



PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA: STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA

Petrus De Alanris Ohaq Lelangrian¹, Rumsari Hadi Sumarto²

Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa^{1,2}

email: lelangrianalan@gmail.com

Diterima: 07/07/2026; Direvisi: 20/07/2026; Diterbitkan: 26/07/2026

ABSTRAK

Pengelolaan sampah perkotaan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 serta meningkatnya tekanan terhadap kapasitas sistem pengelolaan sampah pascapenutupan TPA Regional Piyungan. Kondisi tersebut menuntut evaluasi terhadap implementasi kebijakan agar tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan *descriptive qualitative* melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Komunikasi kebijakan dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat RT, meskipun sosialisasi regulasi terbaru belum menjangkau seluruh masyarakat. Sumber daya secara umum tersedia, namun masih dihadapkan pada keterbatasan lahan, armada operasional, dan perlindungan keselamatan kerja petugas. Disposisi pelaksana ditunjukkan melalui komitmen tinggi pemerintah daerah dan petugas lapangan, sedangkan struktur birokrasi memperlihatkan koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan secara komprehensif berdasarkan empat variabel Edward III dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 pascapenutupan TPA Regional Piyungan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan sosialisasi, peningkatan fasilitas operasional, serta optimalisasi kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Edward III, Kota Yogyakarta.*

ABSTRACT

Urban waste management has become one of the major challenges faced by the Government of Yogyakarta City, particularly following the enactment of Yogyakarta City Regional Regulation Number 9 of 2024 and the increasing pressure on the municipal waste management system after the closure of the Piyungan Regional Final Disposal Site (TPA Piyungan). These circumstances necessitate an evaluation of policy implementation to ensure the achievement of sustainable waste management objectives. This study aims to analyze the implementation of Yogyakarta City Regional Regulation Number 9 of 2024 based on Edward III's four policy implementation variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employed a qualitative descriptive approach using in-depth interviews, field observations, document analysis, and data analysis through the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that policy implementation has been carried out relatively well. Policy





communication has been conducted hierarchically down to the neighborhood (RT) level; however, dissemination of the new regulation has not yet reached all community members. Resources are generally available, although limitations remain in land availability, operational facilities, and occupational safety equipment for field personnel. The disposition of implementers is reflected in the strong commitment demonstrated by the local government and field officers, while the bureaucratic structure exhibits effective inter-agency coordination. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of policy implementation based on Edward III's four variables within the context of the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2024 following the closure of the Piyungan Regional Final Disposal Site. The study concludes that although the policy has been implemented relatively effectively, its overall effectiveness can be further enhanced through broader policy dissemination, improved operational support, and strengthened collaboration among stakeholders to achieve sustainable urban waste management.

Keywords: *Policy Implementation, Waste Management, Edward III, Yogyakarta City.*

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan perkotaan karena berkaitan dengan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan wilayah. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, perkembangan sektor pariwisata, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume timbulan sampah di berbagai daerah terus mengalami peningkatan. Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan pusat aktivitas jasa menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengelola sampah akibat tingginya intensitas aktivitas masyarakat pada wilayah yang relatif terbatas. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (2025) menunjukkan bahwa dengan luas wilayah sekitar 32,82 km² dan kepadatan penduduk lebih dari 11.500 jiwa/km², Kota Yogyakarta menghasilkan timbulan sampah harian yang mencapai lebih dari 300 ton sehingga memerlukan sistem pengelolaan yang efektif, berkelanjutan, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan kondisi perkotaan.

Secara normatif, penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, meningkatkan kegiatan pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang, serta menjamin pelayanan persampahan yang efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa tujuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penutupan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan pada tahun 2023 menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan sampah berbasis landfill menghadapi keterbatasan daya tampung dan risiko lingkungan apabila tidak diimbangi dengan strategi pengurangan serta pengolahan sampah yang memadai. Pengelolaan sampah di TPA Piyungan menunjukkan adanya tekanan lingkungan akibat akumulasi sampah yang berdampak terhadap kualitas lingkungan sekitar, sehingga diperlukan penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu yang berorientasi pada keberlanjutan (Mayangsari & Suhartini, 2023). Situasi tersebut semakin diperberat oleh tingginya aktivitas pariwisata, perdagangan, dan penggunaan produk sekali pakai yang menyebabkan komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, diikuti sampah anorganik dan sampah spesifik, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola persampahan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan berbagai regulasi yang mengatur



penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut berkembang dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 hingga dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022. Perubahan regulasi tersebut bertujuan menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan peraturan nasional, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang lebih komprehensif tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pelaksanaannya karena efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses implementasi yang berlangsung di lapangan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang saling berkaitan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang jelas akan mempermudah penyampaian tujuan kebijakan kepada para pelaksana dan masyarakat, sementara ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme birokrasi yang terkoordinasi menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, analisis terhadap keempat variabel tersebut menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, khususnya setelah adanya perubahan regulasi dan dinamika pengelolaan sampah pasca-penutupan TPA Regional Piyungan.

Berbagai penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah masih menghadapi beragam tantangan. Hambatan yang paling sering ditemukan meliputi lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana, rendahnya kapasitas organisasi pelaksana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai penelitian di Bali, Bogor, Bandung, Kabupaten Tapin, Kota Binjai, dan Kota Ambon yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan akibat berbagai kendala internal maupun eksternal (Adnyana et al., 2023; Soeharsono et al., 2023; Astuti & Kamil, 2024; Arlan, 2024; Manalu et al., 2022; Sakir, 2023). Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

Selain faktor kelembagaan, keberhasilan pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan sinergi antarpemangku kepentingan. Penelitian di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa implementasi program pengelolaan sampah pada Pasar Giwangan maupun melalui metode biopori masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, penyediaan fasilitas, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal (Hendrawan & Ardiyati, 2025; Cantya & Rahmawati, 2024). Hasil penelitian di Kota Sukabumi turut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sedangkan penelitian di Kota Pekanbaru menegaskan pentingnya kolaborasi antar-*stakeholder* dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan (Puspita et al., 2023; Fajri et al., 2024). Sementara itu, penelitian di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa implementasi kebijakan



dapat memberikan hasil yang baik apabila didukung oleh koordinasi yang memadai serta pelaksanaan program yang konsisten (Yudianto et al., 2021).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sebagian besar masih berfokus pada program tertentu, wilayah tertentu, atau hanya menyoroti faktor-faktor implementasi secara parsial. Penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan aspek komunikasi, sumber daya, atau partisipasi masyarakat secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan keempat variabel implementasi menurut Edward III dalam satu kerangka analisis. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta setelah terjadinya perubahan regulasi daerah dan dinamika pengelolaan sampah pasca-penutupan TPA Regional Piyungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih memerlukan kajian lebih komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada konteks terkini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta menggunakan kerangka implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi secara terpadu. Analisis dilakukan pada konteks implementasi kebijakan setelah adanya perubahan regulasi daerah dan perubahan sistem pengelolaan sampah akibat penutupan TPA Regional Piyungan sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, tetapi juga menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta berdasarkan empat variabel implementasi Edward III untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan serta perspektif para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa daerah ini mengalami perubahan sistem pengelolaan sampah setelah penutupan TPA Regional Piyungan sehingga menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 sebagai dasar kebijakan pengelolaan sampah di daerah.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Informan terdiri atas pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, petugas *satgas* depo, penggerobak sampah, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi,



antara lain Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029, serta berbagai artikel ilmiah yang relevan. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sebagai *human instrument* yang didukung oleh pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang selama proses penelitian berlangsung (Sugiyono, 2024). Setiap data yang diperoleh dianalisis secara bertahap untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Proses tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Aspek Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dilakukan melalui berbagai saluran yang melibatkan pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Lingkungan Hidup secara berkala melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pemerintah kelurahan, ketua RW, ketua RT, sekolah, perguruan tinggi, serta pelaku usaha. Selain komunikasi tatap muka, penyampaian informasi juga dilakukan melalui media digital berupa grup *WhatsApp* yang digunakan sebagai sarana koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan koordinator lapangan dan petugas depo. Informasi yang diperoleh dari berbagai informan mengenai pelaksanaan komunikasi kebijakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Aspek Komunikasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Indikator	Hasil Temuan
Sosialisasi	Dilaksanakan secara berkala kepada 45 kelurahan, sekolah, kampus, dan pelaku usaha.
Media komunikasi	Menggunakan pertemuan langsung dan grup <i>WhatsApp</i> .
Penyampaian informasi	Informasi kebijakan disampaikan sebelum pelaksanaan kebijakan diterapkan.
Pengetahuan masyarakat	Sebagian masyarakat mengetahui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024.
Kepatuhan masyarakat	Masih terdapat perbedaan antara tingkat pemahaman dan pelaksanaan pemilahan sampah oleh masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1, informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah disampaikan melalui berbagai media komunikasi yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa petugas lapangan memperoleh informasi kebijakan melalui koordinasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebelum kebijakan diberlakukan. Di sisi lain, beberapa informan dari masyarakat menyampaikan bahwa mereka belum mengetahui perubahan regulasi terbaru mengenai pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat variasi tingkat pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat masyarakat berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para informan. Dokumentasi wawancara dengan salah satu informan penelitian yang memberikan informasi terkait pelaksanaan komunikasi kebijakan pengelolaan sampah disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Riyanto, S.E., M.I.P.

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa wawancara dengan informan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi antara pihak pemerintah dan pelaksana di lapangan. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kebijakan dan memberikan pemahaman kepada petugas mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Temuan ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam implementasi kebijakan melibatkan interaksi antara berbagai pihak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Aspek Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan dukungan kelembagaan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara menunjukkan bahwa jumlah petugas pengelolaan sampah telah tersedia pada setiap wilayah pelayanan, namun kondisi fasilitas operasional masih bervariasi. Beberapa informan menyampaikan bahwa alat pelindung diri digunakan dalam aktivitas sehari-hari, sementara penyediaannya dilakukan secara mandiri oleh sebagian petugas. Ringkasan hasil penelitian mengenai aspek sumber daya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Aspek Sumber Daya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

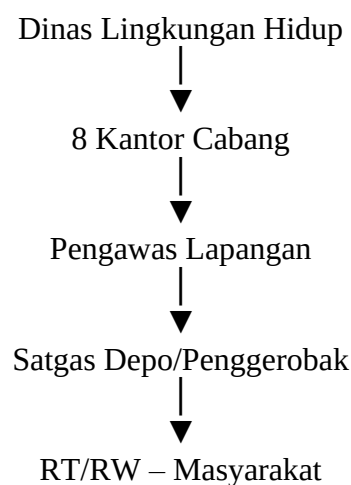
Indikator	Hasil Temuan
Sumber daya manusia	Petugas pengelolaan sampah tersedia pada setiap wilayah pelayanan.

Indikator	Hasil Temuan
Alat pelindung diri	Sebagian petugas menyediakan sendiri sarung tangan, masker, dan sepatu kerja.
Sarana pengangkutan	Sebagian gerobak dan armada pengangkut masih digunakan dalam operasional harian.
Anggaran	Anggaran pengelolaan tersedia melalui Pemerintah Kota Yogyakarta.
Lahan pengolahan	Lokasi pengolahan sampah berada pada kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memerlukan koordinasi antarlembaga.

Berdasarkan Tabel 2, sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan terdiri atas sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta dukungan kelembagaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas lapangan melaksanakan tugas sesuai wilayah kerja masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Informasi dari informan juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melibatkan koordinasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pemanfaatan lokasi pengolahan sampah. Selain itu, data lapangan memperlihatkan adanya variasi kondisi sarana operasional yang digunakan dalam proses pengangkutan sampah.

C. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Aspek Disposisi dan Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh komitmen pelaksana serta mekanisme koordinasi antarorganisasi. Informasi yang diperoleh melalui wawancara memperlihatkan bahwa koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, kantor cabang, pengawas lapangan, hingga petugas operasional. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, TNI, POLRI, dan badan usaha milik daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Gambaran alur koordinasi implementasi kebijakan hasil penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 2. Alur Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, koordinasi berlangsung secara berjenjang mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, pelaporan harian, dokumentasi kegiatan, serta komunikasi menggunakan media digital. Selain koordinasi internal, pelaksanaan kegiatan turut melibatkan berbagai instansi yang mendukung kelancaran operasional di lapangan. Seluruh informasi tersebut diperoleh melalui hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan para informan penelitian. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Maryuma dan Ibu Mariani sebagai informan penelitian disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Maryuma dan Ibu Mariani

Berdasarkan Gambar 3, diketahui bahwa wawancara dilakukan dengan informan yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan koordinasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Informasi yang diperoleh juga memperkuat temuan mengenai pentingnya koordinasi antarpihak dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, koordinasi yang dilakukan secara berjenjang menjadi salah satu unsur yang mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

Pembahasan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan proses yang tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh keterpaduan antara komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya, komitmen pelaksana, serta dukungan struktur birokrasi yang mampu mengoordinasikan berbagai pihak. Fauzan (2024) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan karena melibatkan interaksi antara aktor pelaksana, organisasi, dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, Saraswati et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah akan lebih efektif apabila setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan kebijakan serta didukung oleh mekanisme koordinasi yang berjalan secara berkesinambungan.

Aspek komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah karena berperan dalam membangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban maupun manfaat pengelolaan



sampah dari sumbernya. Ardianti et al. (2026) menekankan bahwa komunikasi lingkungan yang dilakukan secara partisipatif mampu membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, sedangkan Irfansyah et al. (2026) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat cenderung meningkat ketika komunikasi pemerintah dilakukan secara terbuka dan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh intensitas sosialisasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun hubungan yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat.

Selain komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan juga ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun dukungan kelembagaan. Program pengelolaan sampah tidak akan berjalan secara optimal apabila kapasitas organisasi pelaksana belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Abdussamad et al. (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi program bank sampah dipengaruhi oleh dukungan sumber daya organisasi serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Di sisi lain, penerapan prinsip *3R* (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sebagaimana dijelaskan oleh Putranto (2023) menjadi salah satu pendekatan yang mampu mengurangi timbulan sampah apabila didukung oleh fasilitas yang memadai serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Implementasi kebijakan juga memerlukan disposisi pelaksana yang positif serta struktur birokrasi yang mampu menciptakan koordinasi antarlembaga secara efektif. Komitmen pelaksana kebijakan akan memengaruhi konsistensi pelaksanaan program, sedangkan struktur birokrasi menentukan kejelasan pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta proses pengambilan keputusan. Handayani (2023) menjelaskan bahwa disposisi pelaksana merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi karena berkaitan dengan komitmen, integritas, dan kesediaan aparatur dalam menjalankan kebijakan. Selanjutnya, Junus et al. (2025), Saputra et al. (2026), dan Nwadiogbu et al. (2026) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta tata kelola sektor publik yang adaptif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan sinergi antara aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk membangun perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, termasuk melalui kegiatan pemilahan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Soekiswati et al. (2022) menjelaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat dapat dibentuk melalui kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akan lebih efektif apabila masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan sampah.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan pendekatan yang bersifat kolaboratif. Pemerintah berperan sebagai penyusun kebijakan dan fasilitator, sedangkan masyarakat, dunia usaha, serta berbagai organisasi sosial berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program di tingkat lokal.





Kolaborasi yang dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang berkesinambungan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Jika ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan pengelolaan sampah merupakan hasil interaksi antara komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang saling mendukung. Kelemahan pada salah satu aspek tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif. Sebaliknya, ketika keempat aspek tersebut berjalan secara sinergis, implementasi kebijakan akan lebih adaptif terhadap berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Dengan demikian, evaluasi terhadap implementasi kebijakan tidak cukup dilakukan pada aspek administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan efektivitas koordinasi, kapasitas organisasi, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan proses yang dinamis dan memerlukan komitmen seluruh pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang memadai perlu didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya yang mencukupi, aparatur yang memiliki komitmen tinggi, serta struktur birokrasi yang mampu membangun koordinasi lintas sektor. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kolaborasi antar-*stakeholder* menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi implementasi kebijakan tidak hanya memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan program, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pengelolaan sampah di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah telah membentuk sistem pelaksanaan kebijakan yang didukung oleh komunikasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang saling melengkapi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah telah mampu mendukung pelaksanaan kebijakan secara operasional, terutama melalui koordinasi lintas sektor, pembagian tugas yang jelas, serta keterlibatan aktif aparatur di berbagai tingkatan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi belum sepenuhnya ditentukan oleh kesiapan organisasi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan perubahan perilaku masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada aspek administratif, melainkan juga memerlukan penguatan komunikasi publik, peningkatan kesadaran masyarakat, dan keberlanjutan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sosialisasi yang lebih adaptif, penyediaan sarana pendukung bagi petugas lapangan, serta pengembangan pola kemitraan yang lebih luas antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial. Selain itu, penguatan edukasi mengenai pemilahan sampah sejak sumbernya perlu



dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat yang lebih konsisten. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi implementasi kebijakan yang lebih efektif, sekaligus menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan *mixed methods* atau menggunakan perspektif *collaborative governance*, *policy network*, maupun tata kelola lingkungan sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di dinas lingkungan hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868. <https://publik.e-journal.unbitago.ac.id/PUBLIK/article/view/504>
- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. W. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v11i1.57007>
- Ardianti, D., Affandi, N. R. D., & Indry, C. W. (2026). Komunikasi lingkungan berbasis ekofeminisme dalam pengelolaan sampah perkotaan. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 19–46. <https://doi.org/10.23969/linimasa.v9i1.41277>
- Arlan, A. S. B. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin (Studi Kasus Di Kelurahan Bitahan). *NIAGARA Scientific Journal*, 16(1), 88–97. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4113899>
- Astuti, W., & Kamil, I. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung (Studi kasus: Kelurahan Pasirlayung). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 5328–5341. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15522>
- Cantya, N., & Rahmawati, A. (2024). Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah melalui metode biopori di Kota Yogyakarta. *Pamarenda: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 383–394. <https://pamarenda.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/54>
- Fajri, J., Nastasya, M., & Zulkarnaini, Z. (2024, December). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus Perspektif Stakeholder di Kota Pekanbaru. In *PROSIDING SENADIKA: Seminar Nasional Akademik* (Vol. 1, No. 1, pp. 355–363). <https://unars.ac.id/ojs/index.php/SENADIKA/article/view/5833>
- Fauzan, A. (2024). Model implementasi kebijakan publik. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12674>
- Handayani, T. A. (2023). Dimensi disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan sistem kearsipan dinamis terintegrasi (Srikandi) dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. *Media Bina Ilmiah*, 18(4), 867–874. <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/493>



- Hendrawan, I. K., & Ardiyati. (2025). Implementasi program pengelolaan sampah Pasar Giwangan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. *Journal Publicho*, 8(1), 233–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.664>
- Irfansyah, M., Arpandi, A., & Barkatullah, B. (2026). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 44–54. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1767>
- Junus, D., Napir, S., Puspaningrum, D., Ernikawati, & Hatta, H. (2025). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo: Implikasi tata kelola dan reformasi birokrasi. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 5(1, Special Issue), 143–159. <https://ojs.ycit.or.id/index.php/JISSR/article/view/218>
- Manalu, P., Tarigan, F. S., Girsang, E., & Ginting, C. N. (2022). Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285–292. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jkli/article/view/45770>
- Mayangsari, M. A., & Suhartini, S. (2023). Pengaruh pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Piyungan, Kabupaten Bantul terhadap kualitas udara dan tanah di sekitarnya. *Jurnal Sains Dasar*, 12(2), 92–100. <https://doi.org/10.21831/jsd.v12i2.67232>
- Nwadiogbu, N. M., Anekwe, J. K., Mbanefo, O. D., Madubueze, M. H., Egberi, A. E., Elemuo, C. S., & Joe-Ikechebelu, N. N. (2026). Public sector governance and microbial-based sustainable waste management strategies in Nigeria. *Journal of Pollution Monitoring, Evaluation Studies and Control*, 5(1), 194–198. <https://doi.org/10.54117/z9vcg428>
- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>
- Putranto, P. (2023). Prinsip 3R: Solusi efektif untuk mengelola sampah rumah tangga. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 8591–8605. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5882>
- Sakir, A. R. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 58–69. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/article/view/17723>
- Saputra, A. R. W. P. M., Karini, E., Jayus, M., & Rosodor, S. (2026). Implementation of household waste management policy: A Siyasa Tanfidziyah analysis of local government regulation. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5(1), 38–49. <https://doi.org/10.55583/jkih.v5i1.2001>
- Saraswati, P. P., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik*, 17(12), 55–65. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/23205>
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2, Cetakan ke-30). Alfabeta.
- Soekiswati, S., Sulistyani, S., Lestari, N., Sintowati, R., & Fauziah, N. F. (2022). Pengelolaan sampah bernilai ekonomis di Desa Jetis: Upaya perubahan perilaku peduli sampah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*, 2(2), 80–86. <https://doi.org/10.23917/jpmmmedika.v2i2.637>



- Soeharsono, A., Hamdi, M., Maryani, D., & Masrich. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berorientasi lingkungan hidup strategi di Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 209–230. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/1798>
- Yudianto, T., Setyono, P., & Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Implementasi kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 21–26. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>